

DAFTAR PUSTAKA

- Abdhul, Y. (2021, November 25). *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan dan Metode*.
Diambil kembali dari deepublishstore: <https://deepublishstore.com/studi-pustaka/>
- BEM KM UGM. (2016, Oktober 5). *Teknik Pengumpulan Data dengan Wawancara*. Diambil kembali dari open.bemkm.ugm.co.id:https://opendata.bemkm.ugm.ac.id/2016/10/05/teknik-pengumpulan-data-dengan-wawancara/
- Benny setiawan, Y. C. (2020). *Upaya Hukum Pajak*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- BPK RI. (2021 & 2019). *LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (t.thn.). *Fungsi Pajak*. Diambil kembali dari [pajak.go.id:https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak](https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak)
- Djunur, I. (2020). PENERAPAN PRINSIP PENGUNGKAPAN LENGKAP AKUN PIUTANG PERPAJAKAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TA 2017-2019. *Wahana Akuntansi*, 125-152.
- Dwitama, A. D., Evantri, A. F., Irawan, F., & Rabiawal, A. I. (2022). EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA. *AKUNTANSIKU*, 99-105.
- Kanwil DJKN Kalimantan Barat. (t.thn.). *Aset Sumber Pendanaan Pembangunan*.
Diambil kembali dari Kementerian Keuangan:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14633/Aset-Sumber-Pendanaan-Pembangunan.html>

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2020 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak.*

Pratiwi, D., & Martani, D. (2021). REALITAS PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK PEMERINTAH. *INDONESIAN TREASURY REVIEW : JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK.*

Primandita Fitriandi, d. (2021). *Bunga Rampai Keuangan Negara 2021.* Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.

Suwiknyo, E. (2019, Juni 13). *BPK Temukan Kelemahan Pengelolaan Piutang Pajak, Ini Rinciannya.* Diambil kembali dari Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190613/259/933328/bpk-temukan-kelemahan-pengelolaan-piutang-pajak-ini-rinciannya>

Darlini, Nuhung, M., & Salam, A. (2019). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Samsat Gowa. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 42–55.

Febriana, D. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA ...)*, 6(3), 1169–1183. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3873>

- Maisyaroh, U. (2020). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(4), 599–608. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i4.3745>
- Purnawardhani dkk. (2015). 296878276. 1(1), 1–9.
- Putri, R. S. (2017). *Pajak Dengan Surat Paksa Pada Semarang Timur*.
- Rifqiansyah, H., Saifi, M., & Azizah, D. F. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 15(1), 1–10. <https://media.neliti.com/media/publications/84616-ID-analisis-efektivitas-dan-kontribusi-pena.pdf>
- Safitra, Dhian Adhetya ; Swasito, A. P. (2020). Perpajakan II. *ليب*. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- SETJEN DPR-RI. (2010). *Piutang Pajak Sebagai Potensi Pendapatan Negara*. 2, 1–20.
- Sundoro, A. A. (2019). *Praktikum Penagihan Pajak dan Sengketa Pajak*+Nur Farida+20X28+BW+22Nov19.indb.
- Yuspitara, A., Susena, K. C., & Herlin, -. (2017). Analisis Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 198–207. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v5i2.389>

Darlini, Nuhung, M., & Salam, A. (2019). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Samsat Gowa. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 42–55.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2014). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 16*.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). Buku Standar Akuntansi Pemerintah 2021. *STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Republik Indonesia*, 1–391.